

Tragedi 1965 di Solo



Heri Priyatmoko
Dosen Prodi Sejarah,
Fakultas Sastra, Universitas
Sanata Dharma
Peneliti Sejarah Solo

Mereka ingin pula menyudahi kebohongan publik yang diciptakan negara, dan celakanya kadung diwarisi lintas generasi...

korban yang diceburkan dan dibunuh di Bengawan Solo adalah masyarakat yang menjadi korban PKI. Seolah, otak pelaku dari tindakan kejam itu adalah PKI. Padahal, menurut beberapa kajian pustaka, film dokumenter, dan tuturan lisan warga pasca Reformasi, yang ditembak dari sungai raksasa tersebut sebenarnya anggota-partisan PKI dan orang yang di-PKI-kan oleh "tukang tunjuk".

Dari dokumen resmi terbitan pemerintah lokal,

katannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23-10-1965 No. UP. 47/3/20-1534.

Tubuh aparat Pemda dibersihkan secara total mulai dari pejabat tertinggi hingga terendah. Pegawai di seluruh jawatan, instansi, dan perguruan di seluruh kawasan Solo tak luput dari *screening* oleh suatu tim. Bila boleh digambarkan dengan prosentasi, pegawai Pemda yang tersapu mencapai 50,5% dari seluruh pegawai yang ada sebelum

satu pihak, karena negara memang kekurangan tempat menampung tapol yang jumlahnya ribuan. Di lain pihak, bentuk lemahnya pihak keraton yang tak sanggup melawan tindakan kejahatan kemanusiaan yang dikerjakan oleh penguasa Orde Baru.

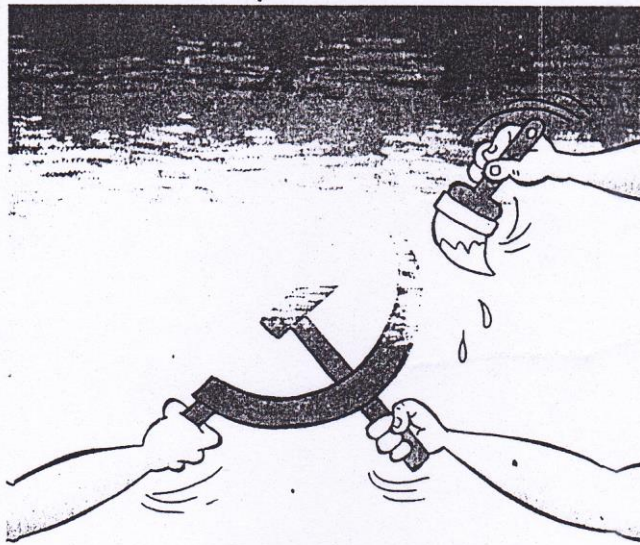
Gagang sapu militer dikibaskan pula di gedung eksekutif yang sebagian besar diduduki oleh bekas wakil dan para wakil PKI. Mereka yang dipecat dan tidak diketahui nasibnya, yaitu

orang DPRD, dan jumlah pegawai pemda yang sangat terbatas. Gampang dibak, roda pemerintahan di Solo macet alias mengalami keadaan tidak bekerja selama beberapa waktu. Parahnya lagi, pemda juga kehilangan tempat bekerja, kendati gedung balaikota diduduki militer untuk dijadikan markas dan tempat tawanan politik. Buahnya, aksi kejahatan kemanusiaan ini menyebabkan gedung bersalin angker. Akhirnya menjadi rusak, kotor, serta tak terpelihara. Dokumen dan arsip penting yang selalu tersimpan baik menjadi bertebaran, rusak dan juga hilang.

Seiring menasar aparat pemerintahan, pembersihan mengarah pula pada lembaga Rukun Tetangga (RT). Misi yang diusung, mengibrida sikap kritis masyarakat sehingga mereka apolitis. Lembaga yang menaungi unit keluarga ini kudu diarahkan untuk membuang jauh pikiran politik, menjadi lembaga kerja, menjaga kerukunan, mengerjakan kebersihan kampungnya, dan melaksanakan keamanan bersama mencapai ketentraman umum. Orde Baru lalu rajin menyuntikkan ideologi hantu komunis untuk diperangi.

Cukilan kisah perih ini bukan bermaksud untuk mengungkit luka masa lalu. Lustru menyuarakan jeritan penyintas yang menolak bahwa PKI—sebagai organisasi politik—dituduh sebagai dalang pembunuhan para jenderal. Buat mereka, peristiwa politik berdarah ini lebih sebagai pertarungan politik para elit di level pusat. Tak sedikit dari mereka—ka malah mengutuknya.

Di Solo, para ekstopol masih banyak kita jumpai. Tentu mereka mengharapkan cap negatif atau diskriminasi sosial dihapus, serta mengembalikan hak-hak politiknya. Mereka menyambut baik ide rekonsiliasi kultural demi menyambung ikatan sosial yang retak, membasuh rasa paseduluran agar segar. Mereka ingin pula menyudahi kebohongan publik yang diciptakan negara, dan celakanya kadung diwarisi lintas generasi...



Dok

September baru saja menjauh dari kita. Saban September, orang-orang sepuh di telatah Solo teringat istilah *tintrim*. Itulah terminologi lokal yang pas guna memotret suasana Solo saat tragedi berdarah 1965 silam. *Tintrim* adalah lawan kata dari *tentrem* (tentram), yang mengandung arti: sepi, damai, tenang, dan takut. Kota yang semula *adem ayem*, bersalin menyeramkan.

Kala itu, barisan militer diterjunkan ke kota tua ini untuk *ngosek* anggota-partisan Partai Komunis Indonesia atau orang yang di-PKI-kan. Mereka dituduh dalang kudeta. Bahkan, harian *Berita Juidha* dan *Angkatan Bersendjata* mengumumkan keterlibatan PKI sebagai dalang tragedi Lobang Buaya. Ini segulung kebohongan yang diciptakan rezim pendahulu yang kudu didekonstruksi agar warga tidak menyimpan dendam dan awet melekatan citra negatif eks-tapol.

Majalah *Liberty* edisi 27 November 1965 mengabarkan, akibat perbuatan kontrarevolusi Gestapu (Gerakan 30 September 1965), di Bengawan Solo bergelimpang mayat korban keganasan Gestapu di area Solo dan sekitarnya. Di antara para korban itu, dijumpai beberapa mayat wanita dan pemuda. Berkat kesiapan ABRI yang bekerjasama dengan rakyat setempat, keganasan yang terjadi di daerah tersebut sedikit demi sedikit berhasil diamankan dan ketertiban umum dapat dipulihkan kembali. Dalam kolom media lawas itu, terpampang foto Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie yang berseragam militer.

Cerita di muka membenarkan suatu persepsi bahwa

saya memungut informasi bahwa aksi pembersihan, yang sebagian dihanyutkan di sungai purba itu dimulai 23 Oktober 1965 sampai pengujung tahun 1967, bahkan secara insidental hingga 1970an masih berjalan. Seorang anggota ABRI bernama Letkol Infantri Th. J. Soemantha diturunkan ke Solo sekaligus mengisi kekosongan kepemimpinan selepas Oetomo Ramelan, walikota Solo kala itu, diikut. Dialah tokoh kali pertama dalam sejarah pemerintahan daerah yang diangkat jadi walikota bukan dari pejabat sipil, kendati semula hanya sebagai *caretaker*. Soemantha menjabat selama 2 tahun 3 bulan dalam rangka pembersihan di "kota merah" ini. Pengang-

tragedi nasional 1965.

Pak Ut—sapaan akrab Oetomo Ramelan—turut ditangkap. Sebelum menahkodai balaikota tanggal 17 Februari 1958, dia adalah guru ekonomi dan tata negara SMU negeri 1 Surakarta dan juga anggota DPRD peralihan Kotapraja Surakarta yang merupakan wakil dari PKI. Ketika itu, lelaki ini tidak melarikan diri keluar daerah, tetapi hanya bersembunyi di sebuah ruangan gedung balaikota. Lantas ditangkap dan ditawan beberapa waktu di ndalem Sasonomulya bersama ribuan orang, kemudian memperoleh hukuman mati. Menarik mencermati ndalem pangeran itu kok bisa digunakan sebagai lokasi tahanan sementara. Di

Soeparto Ronopoespito, W. Sutarno, dan S. Reksokartono. Selain itu, sekitar 17 orang anggota DPRD Surakarta yang dipecat antara lain Sadali, Soenardi, Soekiman, Sastrokartono, Soetarman, Srijono, Mitro Koesen, Wijadi Padmodiharjo, Koestinah Soenarjo, Dilar Darmawan, Pratiwo Poernomohadi, Njoo Ping Bie, dan masih beberapa lagi.

Pembersihan dan pemecatan birokrat menyebabkan Solo tak punya kepala daerah, hanya memiliki 2 orang anggota eksekutif, 12

Redaksi menerima tulisan opini, diutamakan tema lokal Surakarta dan sekitarnya. Tulisan merupakan asli karya sendiri dan belum atau tidak dikirimkan ke media lain. Ketik sepanjang 6.000 karakter dengan spaces dan kirim via email ke: opini.joglosemar@gmail.com. Lengkapi identitas diri, foto dalam pose santai, nomor rekening dan nomor telepon. Jika dalam waktu dua pekan tulisan belum dimuat, otomatis penulis berhak mencabut tulisan tersebut.